



PT. Bank Perekonomian Rakyat
TATA KARYA INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN 2025

PT BPR Tata Karya Indonesia

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
Ikhtisar Utama	<i>ii</i>
I. Laporan Manajemen	1
Laporan Direksi	1
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	5
II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif	9
III. Kepemilikan	12
IV. Perkembangan Usaha	13
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen	16
VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia	27
VII. Laporan Keuangan Tahunan	31
VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik	40
Surat Pernyataan Kebenaran Laporan Keuangan Tahunan	41

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, **BPR Tata Karya Indonesia** dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2025 ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta transparansi kinerja perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, regulator, dan masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan, khususnya BPR. Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, **BPR Tata Karya Indonesia** tetap berkomitmen untuk menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro yang sehat, likuid, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Kami bersyukur bahwa melalui kerja keras seluruh karyawan, dukungan dari komisaris dan direksi, serta kepercayaan nasabah, BPR Tata Karya Indonesia mampu mencatatkan kinerja positif di berbagai aspek.

Beberapa pencapaian utama sepanjang tahun 2025 antara lain:

- **Pertumbuhan aset** yang stabil, didukung oleh peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga.
- **Penyaluran kredit produktif** yang tepat sasaran, terutama kepada UMKM dan sektor riil.
- **Peningkatan layanan digital** untuk mempermudah akses nasabah, sekaligus menjaga keamanan transaksi.
- **Perbaikan kualitas aset** dan pengelolaan risiko yang lebih baik.

PT BPR Tata Karya Indonesia

Ikhtisar Keuangan 2025 — Ketahanan & Pertumbuhan Berkelanjutan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Kredit yang Diberikan

Rp 53.961.198.036

Pendapatan Operasional

Rp 13.057.196.224

Beban Operasional

Rp 9.545.945.662

Pendapatan Non Operasional

Rp 194.826.287

Beban Non Operasional

Rp 260.956.652

Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Rp 2.828.652.042

Rasio Keuangan

KPMM

51,37%

NPL Neto

10,74%

NPL Gross

15,96%

ROA

4,14%

BOPO

73,11%

NIM

8,86%

LDR

106,73%

Cash Ratio

12,18%

I. Laporan Manajemen

1. Laporan Direksi

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya, sehingga PT BPR Tata Karya Indonesia berhasil melalui tahun 2025 yang terus berkembang dinamis dan penuh ketidakpastian dengan pertumbuhan dan kinerja yang cukup baik. Pencapaian ini sejalan dengan visi dan misi BPR Tata Karya Indonesia untuk berkomitmen mendukung pembangunan perekonomian rakyat di DKI Jakarta dengan menjadi BPR yang maju dan terpercaya. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Bank melindungi dan melayani seluruh pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika perbankan. Bank menyediakan produk dan jasa sesuai kebutuhan segmen pasar serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui proses yang mudah dan cepat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, asas perbankan sehat, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Strategi dan Kebijakan Strategis BPR

Meskipun dihadapkan pada tantangan penurunan kualitas kredit ritel di industri BPR sepanjang 2025, BPR Tata Karya Indonesia tetap optimis dan berhati-hati dengan fokus pada pertumbuhan berkualitas. Strategi utama meliputi penguatan penghimpunan dana pihak ketiga melalui inovasi produk dan kepuasan nasabah, peningkatan kompetensi SDM di bidang pemasaran, analisis kredit dan manajemen risiko, serta penguatan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulator. Direksi berperan aktif dalam menetapkan arah strategis, target terukur (KPI), serta memastikan keselarasan dan monitoring pelaksanaan di seluruh unit.

Realisasi Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, PT BPR Tata Karya Indonesia menunjukkan kinerja profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari pencapaian rasio keuangan utama, yaitu *Return on Assets* (ROA) sebesar 4,14% dan *Return on Equity* (ROE) sebesar 12,24%. Pertumbuhan kredit menurun sebesar 17,01% secara tahunan tetapi dengan kualitas kredit yang relatif baik yang ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *Gross* sebesar 15,96%. Dari sisi efisiensi operasional, BPR Tata Karya Indonesia berhasil mengendalikan biaya dengan baik, sebagaimana tercermin pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 73,11%.

Pada akhir tahun 2025, PT BPR Tata Karya Indonesia juga berhasil memenuhi dan melampaui sebagian besar target keuangan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan kinerja manajemen yang solid dalam mengeksekusi strategi bisnis secara disiplin, serta kemampuan BPR Tata Karya Indonesia beradaptasi dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Kendala, Tantangan dan Antisipasinya

Sepanjang 2025, BPR Tata Karya Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global, domestik, dan regional, termasuk ketidakpastian kebijakan moneter, meningkatnya persaingan likuiditas, serta iklim usaha yang kurang kondusif. Menghadapi kondisi ini, BPR Tata Karya Indonesia fokus pada pertumbuhan kredit berkualitas melalui pendalaman ekosistem bisnis, penguatan disiplin risiko, dan optimalisasi kapabilitas yang telah ada.

Langkah-langkah utama yang dilakukan:

1. **Perbaikan proses kredit menyeluruh** (end-to-end) untuk meningkatkan kualitas portofolio dan konsistensi manajemen risiko di semua segmen.
2. **Peningkatan kualitas kredit eksisting** melalui monitoring ketat dan penanganan dini potensi kredit bermasalah.
3. **Penguatan pendanaan** untuk menopang ekspansi kredit, mempertebal NIM, dan menjaga likuiditas.
4. **Pengembangan kompetensi SDM** melalui pelatihan perbankan.
5. **Penguatan kepatuhan dan tata kelola** dengan menyelaraskan kebijakan terhadap regulasi serta memperkuat pengawasan internal.

Penerapan Tata Kelola

Pada tahun 2025 BPR Tata Karya Indonesia menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan GCG diarahkan untuk memastikan pengelolaan Perseroan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar.

Direksi menjalankan fungsi pengelolaan operasional secara efektif dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Perseroan, sementara Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara independen guna memastikan kebijakan dan strategi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mendukung hal tersebut, BPR Tata Karya Indonesia juga memperkuat fungsi pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil *Self Assessment* terhadap 12 Faktor Penerapan Tata Kelola berada pada Peringkat Komposit 2 (Baik). Hal ini menunjukkan Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR Tata Karya Indonesia berupaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Penerapan Manajemen Risiko

BPR Tata Karya Indonesia menerapkan manajemen risiko terintegrasi untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha, sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan regulator. Penerapan ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko utama seperti risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas penerapan manajemen risiko, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan. Untuk mendukung efektivitasnya, BPR memperkuat fungsi risiko dan pengendalian internal dan pemantauan profil risiko secara berkala.

Dalam risiko kredit, BPR menerapkan analisis komprehensif, pemantauan aset, dan penanganan dini kredit bermasalah. Risiko operasional dikelola dengan peningkatan sistem dan prosedur kerja. Risiko kepatuhan dimitigasi dengan tunduk pada regulasi OJK serta memenuhi kewajiban pelaporan dan komitmen.

Hasil Penilaian Profil Risiko Semester II 2025 menunjukkan peringkat **2 (rendah)** dengan karakteristik:

Kemungkinan kerugian dari risiko inheren tergolong rendah.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memadai, meskipun terdapat kelemahan minor yang perlu mendapat perhatian manajemen.

Dengan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan, BPR optimis menjaga kinerja sehat, meningkatkan

kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan.

Tingkat Kesehatan Bank

BPR Tata Karya Indonesia secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) dan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile*), penerapan tata kelola (*good corporate governance*), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*).

Self-Assessment TKB dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, dengan hasil akhir berupa Peringkat Komposit (PK).

Hasil *Self-Assessment* Tingkat Kesehatan BPR Tata Karya Indonesia secara Individu posisi 31 Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2). Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain, tercermin dari peringkat faktor penilaian tersebut antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik.

Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

BPR Tata Karya Indonesia melaksanakan sistem pengendalian internal dalam proses Pelaporan Keuangan Bank untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan Bank sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 15 Tahun 2024. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan BPR Tata Karya Indonesia bertujuan untuk :

- (1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
- (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan;
- (3) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan;
- (4) Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan (PIPKu) dilaksanakan agar Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan semakin berintegritas. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab Direksi. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awareness*) yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi serta melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan pasal 8 ayat (3) POJK No. 15 Tahun 2024.

BPR Tata Karya Indonesia juga telah menyusun Laporan PIPKu Tahun 2025 dan melaporkannya ke OJK sebagai bagian dari Laporan Tahunan 2025. Laporan PIPKu BPR Tata Karya Indonesia dimaksud memuat:

1. Laporan Pengujian Atas Pos-pos pada Laporan Keuangan apakah sudah wajar dan dicatat sesuai dengan POJK yang mengatur tentang Pencatatan Transaksi dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)
2. *Self Assessment* Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank menggunakan 5 Komponen COSO dalam ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*) yaitu penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) komponen pengendalian COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan.

Apresiasi dan Penutup

Direksi BPR Tata Karya Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan, arahan, dan pengawasan yang diberikan dalam menjalankan tugas operasional. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham dan nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan, yang memungkinkan BPR Tata Karya Indonesia untuk terus tumbuh dan berkelanjutan, serta mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang solid di tengah tantangan dan ketidakpastian. Kami juga berterima kasih kepada regulator serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik sepanjang 2025.

Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja kerasnya, yang memungkinkan BPR Tata Karya Indonesia untuk terus berkembang dan mewujudkan visi serta misi yang kita emban bersama. Kinerja baik pada tahun 2025 menjadi landasan bagi pencapaian yang semakin kokoh di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kepada seluruh nasabah dan mitra kerja, merupakan suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar PT BPR Tata Karya Indonesia, untuk senantiasa dapat melayani serta memenuhi harapan Anda. BPR Tata Karya Indonesia berkomitmen untuk terus menyediakan produk dan layanan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit, yang selaras dengan perkembangan skala usaha serta memenuhi pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif nasabah.

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Kepada Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyerahkan Laporan Pengawasan atas pengelolaan Bank untuk tahun buku 2025. Di tengah kondisi ekonomi dan dunia usaha yang belum kondusif, BPR Tata Karya Indonesia berhasil menjaga ketahanan kinerja serta stabilitas usaha melalui disiplin eksekusi strategi dan pengelolaan risiko yang prudensial.

Laporan Dewan Komisaris mencakup penilaian atas kinerja Direksi dalam mengelola perusahaan serta pengawasan terhadap perumusan dan pelaksanaan strategi; pandangan mengenai prospek usaha BPR Tata Karya Indonesia; dan pengawasan penerapan tata kelola perusahaan serta kinerja struktur organ tata kelola.

Pelaksanaan Kewajiban Pengawasan

Pada tahun buku 2025, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan atas Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pengawasan atas kinerja Direksi dilakukan dengan memonitor pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), menilai pencapaian hasil keuangan dan operasional, serta memberi arahan strategis untuk pengembangan usaha
2. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola (GCG) dengan memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diimplementasikan, serta menilai efektivitas fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko, termasuk risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan, serta menilai secara berkala laporan profil risiko BPR Tata Karya Indonesia
4. Pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Internal, termasuk kontrol internal dalam proses pelaporan keuangan bank, bertujuan menilai kecukupan sistem pengendalian internal (*internal control*) serta memantau tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal hingga diselesaikan secara tuntas
5. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan kewajiban (*comply with*) penyampaian laporan selaku memenuhi semua ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menuntaskan setiap komitmen yang dibuat BPR dengan regulator.

Kedalaman dan Cara Pelaksanaan Rapat

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris PT BPR Tata Karya Indonesia secara rutin mengadakan rapat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan.

Rapat dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan agenda meliputi evaluasi kinerja, diskusi strategi bisnis, pengawasan pelaksanaan tata kelola, serta pemantauan profil risiko Perseroan.

Dewan Komisaris menilai pelaksanaan rapat sepanjang tahun 2025 telah berlangsung efektif dan optimal. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi anggota Dewan Komisaris yang tinggi, pelaksanaan rapat secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan agenda yang komprehensif dan relevan dengan kondisi Perseroan, pencapaian pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berkualitas, serta tindak lanjut yang memadai atas setiap rekomendasi dan hasil rapat.

Sehingga, rapat Dewan Komisaris berperan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta menjamin penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT BPR Tata Karya Indonesia.

Evaluasi terhadap Performa Direksi

Penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris dituangkan dalam Key Performance Indicators (KPI) Direksi, baik secara individual maupun kolegiat, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan yang berlaku. *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi, baik secara individu maupun kolektif, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan PT BPR Tata Karya Indonesia dengan baik, serta menunjukkan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti saran serta nasihat yang diberikan. Usaha tersebut tercermin pada kinerja perusahaan yang terus terjaga dan mengalami perbaikan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Dewan Komisaris juga mengungkapkan penghargaan atas usaha keras dan dedikasi seluruh jajaran Direksi dalam memelihara serta meningkatkan kinerja Bank secara optimal, meski kondisi perekonomian masih dipengaruhi ketidakpastian, baik di tingkat nasional maupun regional.

Ke depannya, Dewan Komisaris mendorong Direksi agar terus memperkuat kinerja melalui penguatan strategi bisnis, penerapan manajemen risiko yang lebih efektif, serta memaksimalkan peluang pertumbuhan yang ada, demi memastikan kelangsungan usaha PT BPR Tata Karya Indonesia.

Evaluasi serta Penilaian Dewan Komisaris mengenai Prospek Bisnis

Dewan Komisaris menilai prospek BPR ke depan cukup menantang karena kondisi ekonomi makro dan regional belum tumbuh signifikan. Oleh karena itu, fokus harus pada: penyaluran kredit berkualitas, peningkatan kolektibilitas kredit, penguatan DPK, peningkatan kompetensi pegawai, serta penguatan permodalan secara organik.

Dewan Komisaris mendukung prospek bisnis 2026 yang disusun Direksi, karena dinilai seimbang antara memaksimalkan peluang usaha dan menerapkan mitigasi risiko yang memadai.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menggunakan asumsi realistis dan terukur, sehingga target optimal dapat tercapai sesuai prinsip kehati-hatian.

Selain itu, Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk terus menjaga kecukupan modal dan likuiditas sebagai fondasi utama dalam menghadapi dinamika usaha, demi kelangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Pengawasan atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Salah satu fungsi Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, adalah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik-transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran-dalam setiap aktivitas usaha BPR Tata Karya Indonesia di semua tingkatan dan jenjang organisasi.

Bisnis perbankan didasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan nasabah, (*trust*) sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi kunci penting untuk melindungi dan/ atau memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan penilaian pribadi terhadap 12 Faktor Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2025, BPR Tata Karya Indonesia memperoleh Peringkat Komposit 2 (Baik).

Pengawasan atas Pengendalian Internal dalam Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Bank

Mengacu pada POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank pada Pasal 9 ayat (1) dan (3), di mana Dewan Komisaris BPR wajib mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, maka hasil pengawasan Dewan Komisaris tersebut harus dituangkan ke dalam Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (P2RBB) secara semesteran sesuai dengan POJK terkait RBB BPR dan BPRS.

Berdasarkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal

dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal berikut ini:

1. Direksi telah menyusun dan menyajikan Informasi Keuangan serta Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;
2. Menurut Laporan Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Integritas Pelaporan Keuangan (PIPku) Bank tahun 2025, yang telah diterima oleh Dewan Komisaris, berisi mengenai: a. Hasil Penilaian Mandiri Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPku) yang dilaksanakan oleh Direksi memperoleh Peringkat 1 (Memadai) dan b. Laporan Hasil Pengujian atas Pos-Pos Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2025 yang telah disusun oleh Unit atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank (hasil pengolahan data dan analisis dari SI-PIPku),
3. Dewan Komisaris memastikan bahwa BPR telah melaksanakan pengendalian internal yang efektif dalam proses pelaporan Keuangan Bank pada tahun 2025.
4. Tidak ada tindakan yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan kepada orang yang bersangkutan atau pihak lain;
5. Tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun terhadap Bank yang menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank, maupun adanya kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Pengawasan Implementasi Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah.

Pengawasan Pelaksanaan Program APU PPPT dan PPPSPM

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) adalah suatu program wajib dalam setiap hubungan usaha dengan calon nasabah maupun pengguna jasa Bank (Nasabah atau *Walk In Customer*) yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan yang diberlakukan pada tanggal 14 Juni 2023.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa penerapan program APU PPT dan PPPSPM di BPR Tata Karya Indonesia telah berjalan dengan baik dengan melaksanakan upaya pencegahan dan memitigasi risiko Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) sebagai sarana melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara operasional dalam penerapannya, Unit Kerja dan seluruh tingkatan pegawai pada BPR telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur APU PPT dan PPPSPM.

Pengawasan Implementasi Strategi Pencegahan Penipuan

Merujuk pada POJK No. 12 Tahun 2024 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) Bagi Lembaga Jasa Keuangan, PT BPR Tata Karya Indonesia sebagai Lembaga Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan Standar Prosedur Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud yang mengikuti POJK No. 12 Tahun 2024. *SOP tersebut menegaskan komitmen manajemen PT BPR Tata Karya Indonesia untuk mencegah terjadinya fraud* dengan menerapkan sistem pengendalian fraud yang efektif dan berkelanjutan. Sistem pengendalian fraud ini membantu BPR Tata Karya Indonesia dalam menentukan langkah-langkah guna mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau kejadian *fraud*.

Dewan Komisaris menegaskan kepatuhan terhadap empat pilar Strategi Penerapan *Anti Fraud* yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut, yang tercermin dalam Laporan Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester I dan II Tahun 2025 yang memuat *Self Assessment* terhadap empat Pilar yang disampaikan setiap semester kepada OJK dan disampaikan ke Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan keempat pilar Strategi *Anti*

Fraud umumnya telah dilaksanakan dengan memadai, meskipun masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut.

Mengingat situasi tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan saran/ nasihat kepada Direksi supaya:

1. Seluruh Unit Kerja diwajibkan terus menerapkan fungsi pengawasan/kontrol (mulai dari *maker*, *checker* hingga *approval*) secara ketat dan penuh tanggung jawab guna meningkatkan pengendalian internal serta menjaga BPR Tata Karya Indonesia agar tidak terjadinya *fraud*.
2. Sosialisasi dan peningkatan *risk awareness* untuk mencegah terjadinya potensi risiko *Fraud*. BPR harus berkomitmen melakukan sosialisasi atau kampanye kesadaran anti *fraud*, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi.

Penutupan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT BPR Tata Karya Indonesia mengungkapkan apresiasi tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan atas prestasi, komitmen, serta dedikasi yang mereka tunjukkan sepanjang tahun buku 2025.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan Perseroan secara baik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang efektif dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

Ke depan, Dewan Komisaris bertekad untuk terus memperbaiki mutu fungsi pengawasan secara independen dan objektif, agar setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh Perseroan tetap konsisten dengan prinsip tata kelola yang baik serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris tetap berupaya mempererat sinergi bersama Direksi demi menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi semua pemangku kepentingan.

II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

1. Data Direksi dan Dewan Komisaris

1.	Nama	FERYANTO NJOMIN
	Alamat	Pluit Mas Blok DD Nomor 5 RT 001 RW 018
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tanggal Mulai Menjabat	04 Desember 2023
	Tanggal Selesai Menjabat	04 Desember 2026
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-74/KR.0113/2019
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	01 Februari 2019
	Pendidikan Terakhir	S2
	Tanggal Kelulusan	28 Agustus 2002
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES
	Pendidikan Non Formal Terakhir	WORKSHOP MENGGALI HARTA KARUN ATAS KREDIT
	Tanggal Pelatihan	09 Oktober 2019
	Lembaga Penyelenggara	PERBARINDO
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	21 September 2028

2.	Nama	HENDRA NUGRAHA
	Alamat	JL JAGAKARSA I No 19 RT 005 RW 002
	Jabatan	Komisaris
	Tanggal Mulai Menjabat	04 Desember 2023
	Tanggal Selesai Menjabat	04 Desember 2026
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-74/KR.0113/2019
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	01 Februari 2019
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	02 Oktober 1999
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS PANCASILA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	PENYESUAIAN PROGRAM APU PPT
	Tanggal Pelatihan	24 Juli 2017
	Lembaga Penyelenggara	PERBARINDO
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	24 Oktober 2026
3.	Nama	LIDIANTY SIMBOLON
	Alamat	PONDOK SERUT RT/RW 005/003
	Jabatan	Direktur
	Tanggal Mulai Menjabat	17 Oktober 2025
	Tanggal Selesai Menjabat	17 Oktober 2028
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	SR-61/KR.0113/2022
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	27 September 2022
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	11 Agustus 2005
	Nama Lembaga Pendidikan	STIE STAN INDONESIA MANDIRI
	Pendidikan Non Formal Terakhir	SOSIALISASI KETENTUAN APLIKASI APOLO LBBPR
	Tanggal Pelatihan	12 Januari 2023
	Lembaga Penyelenggara	OJK
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	29 Juni 2027

2. Data Pejabat Eksekutif

1.	Nama	KENNEDY NJOMIN
	Alamat	Komp. Harmoni Mas Blok E22 Jakarta Utara
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	29 April 2024
	Surat Pengangkatan No.	016/BPRTKI/DKI/IV/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	29 April 2024
2.	Nama	FENY
	Alamat	Teluk Gong JL. B4 No 12 C
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	03 Mei 2024
	Surat Pengangkatan No.	018/BPRTKI/DKI/V/24
	Surat Pengangkatan Tanggal	03 Mei 2024
3.	Nama	EKA LIENDA NOVYANA
	Alamat	Asrama Yon Arhanud 1 Serpong
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Audit Intern
	Tanggal Mulai Menjabat	19 Juni 2024
	Surat Pengangkatan No.	023/BPRTKI/DKI/VII/24
	Surat Pengangkatan Tanggal	05 Juli 2024
4.	Nama	ERI DARMAWAN
	Alamat	Kp. Burujul RT.025/ RW.005 Ds. Sodonghilir, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif APU dan PPT, Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	03 Maret 2025
	Surat Pengangkatan No.	DIR/001/SK/BPRTKI/II/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	24 Februari 2025

III. Kepemilikan

Daftar Kepemilikan

1.	Nama	LILY NJOMIN
	Alamat	Pluit Mas Blok DD Nomor 5 RT 001 RW 018
	Jenis Pemilik	Perorangan
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp700.000.000
	Persentase Kepemilikan	5.00%
2.	Nama	FERYANTO NJOMIN
	Alamat	Pluit Mas Raya Blok C No. 7 B RT 001 RW 018
	Jenis Pemilik	Perorangan
	Status Pemegang Saham	PSP
	Jumlah Nominal	Rp13.300.000.000
	Persentase Kepemilikan	95.00%

Daftar Ultimate Shareholder

IV. Perkembangan Usaha

1. Riwayat Pendirian BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
Nomor akta pendirian	03
Tanggal akta pendirian	06 September 2007
Tanggal mulai beroperasi	03 Maret 2008
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	59
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	17 Oktober 2025
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-AH.01.09-0352350
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	20 Oktober 2025
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Perbankan
Tempat kedudukan	Jl Jembatan Tiga No. 35 A-B, Penjaringan, Jakarta Utara

Hasil Audit Akuntan Publik	
Opini Akuntan Publik	01. Wajar Tanpa Pengecualian
Nama Akuntan Publik	Yohan H. Wibowo

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting	
	<i>Dalam Satuan Rupiah Penuh</i>
Keterangan	Nominal
Pendapatan Operasional	13.057.196.224
Beban Operasional	9.545.945.662
Pendapatan Non Operasional	194.826.287
Beban Non Operasional	260.956.652
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3.445.120.197
Taksiran Pajak Penghasilan	616.468.155
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.828.652.042

3. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Kualitas Aset Produktif

Dalam Satuan Rupiah Penuh

Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	19.905.845.326	-	-	-	-	19.905.845.326
Kredit yang Diberikan	-	-	-	-	-	-
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	2.166.618.949	-	-	-	-	2.166.618.949
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	39.312.281.433	3.867.750.967	1.697.011.869	1.251.061.202	5.666.473.616	51.794.579.087
Jumlah Aset Produktif	61.384.745.708	3.867.750.967	1.697.011.869	1.251.061.202	5.666.473.616	73.867.043.362

Rasio Keuangan

Keterangan	Nilai Rasio
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	51,37
Rasio Cadangan terhadap PPKA	81,96
NPL Neto	10,74
NPL Gross	15,96
Return on Assets (ROA)	4,14
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	73,11
Net Interest Margin (NIM)	8,86
Loan to Deposit Ratio (LDR)	106,73
Cash Ratio	12,18

4. Penjelasan NPL

Penjelasan, Penyebab, dan Langkah Penyelesaian NPL

NPL Gross (%)	15,96
NPL Neto (%)	10,74

Penyebab Utama Kondisi NPL:

Penyebab utama terjadinya Non-Performing Loan (NPL) pada BPR dalam periode satu tahun terakhir berasal dari kredit sindikasi yang telah berjalan lama. Kredit sindikasi tersebut mengalami penurunan kinerja debitur akibat tekanan pada sektor ekonomi yang melambat serta kondisi usaha debitur yang tidak stabil sepanjang siklus usaha yang panjang dan faktor eksternal berupa perubahan kondisi pasar juga turut berkontribusi terhadap peningkatan NPL.

Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian yang telah dilakukan BPR dalam periode satu tahun terakhir untuk mengatasi NPL meliputi pelaksanaan restrukturisasi kredit secara bertahap terhadap debitur kredit sindikasi yang bermasalah, termasuk penjadwalan ulang angsuran dan penurunan suku bunga. BPR juga melakukan perbaikan kinerja internal melalui peningkatan sistem monitoring kredit dan evaluasi berkala terhadap kolektibilitas debitur. Mitigasi risiko diterapkan dengan memperketat analisis awal pemberian kredit sindikasi serta diversifikasi portofolio. Penyelesaian kredit NPL dilakukan melalui usaha negosiasi dan eksekusi agunan.

5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan

Selama tahun 2025 BPR terus berupaya mengembangkan usaha dengan menjalin kerjasama strategis bersama beberapa perusahaan, termasuk perusahaan peer- to- peer lending dan lembaga pelatihan kerja, dalam rangka penyaluran kredit yang lebih efektif dan efisien.

V. Analisis dan Pembahasan Manajemen

1. Tinjauan Perekonomian

Tinjauan Perekonomian

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif **cukup stabil**, meskipun dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global yang cukup tinggi.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi didorong oleh **konsumsi rumah tangga dan investasi** yang tetap kuat. Peningkatan daya beli masyarakat, dukungan belanja pemerintah, serta berbagai program stimulus dan bantuan sosial turut memperkuat permintaan domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi industri perbankan, termasuk BPR Tata Karya Indonesia, kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pertumbuhan kredit diproyeksikan meningkat, sejalan dengan pemulihan sektor riil. Namun di sisi lain, kehati-hatian tetap diperlukan dalam pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan kualitas aset di tengah ketidakpastian global yang berimbas ke perekonomian nasional dan di tingkat regional.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2025, industri BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit secara selektif dan produktif, memperkuat manajemen risiko, khususnya risiko kredit dan likuiditas, mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan wilayah pemasaran untuk pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM.

Langkah-langkah tersebut penting diambil oleh BPR Tata Karya Indonesia untuk meningkatkan penjualan kredit dan menjaga kualitas kredit serta memupuk DPK di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian daerah.

2. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha

Kinerja PT BPR Tata Karya Indonesia tahun 2025 merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan secara menyeluruh meliputi pelayanan, sistem kerja dan peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia. Beberapa Strategi dan Kebijakan guna mewujudkan pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

- Strategi pengembangan bisnis di era digital
Menggunakan media sosial dan platform online untuk menjangkau lebih luas masyarakat.
- Penguatan Modal
Peningkatan kualitas aset yaitu mengelola aset dengan lebih efisien untuk meningkatkan profitabilitas.
- Strategi Pemasaran
Promosi produk yaitu menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti pinjaman mikro dan tabungan dengan bunga kompetitif.
Edukasi keuangan yaitu mengadakan literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan.
- Arah kebijakan dalam penguatan usaha BPR
Penguatan kelembagaan yaitu meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur BPR untuk bersaing di pasar.

Strategi dan Kebijakan Dalam Manajemen Risiko

- Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko
Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko yaitu Membuat dokumen kebijakan yang jelas mengenai manajemenrisiko, termasuk defnisi risiko, jenis- jenis risiko yang dihadapi (risiko kredit, risiko liuiditas, risiko

operasional, dan risiko pasar), serta prosedur penanganannya.

- **Pelatihan Manajemen Risiko**

Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai manajemen risiko dan pentingnya tata kelola yang baik.

- **Implementasi Sistem Pengendalian Internal**

Penerapan Prosedur Pengendalian Internal yaitu Mengembangkan dan menerapkan prosedur pengendalian internal yang ketat untuk meminimalkan risiko operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Audit Internal Berkala yaitu Melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan manajemen risiko yang ada.

- **Penggunaan Teknologi Informasi**

Sistem Manajemen Risiko Berbasis TI yaitu Mengimplementasikan perangkat lunak manajemen risiko yang dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan risiko.

- **Kepatuhan terhadap Regulasi**

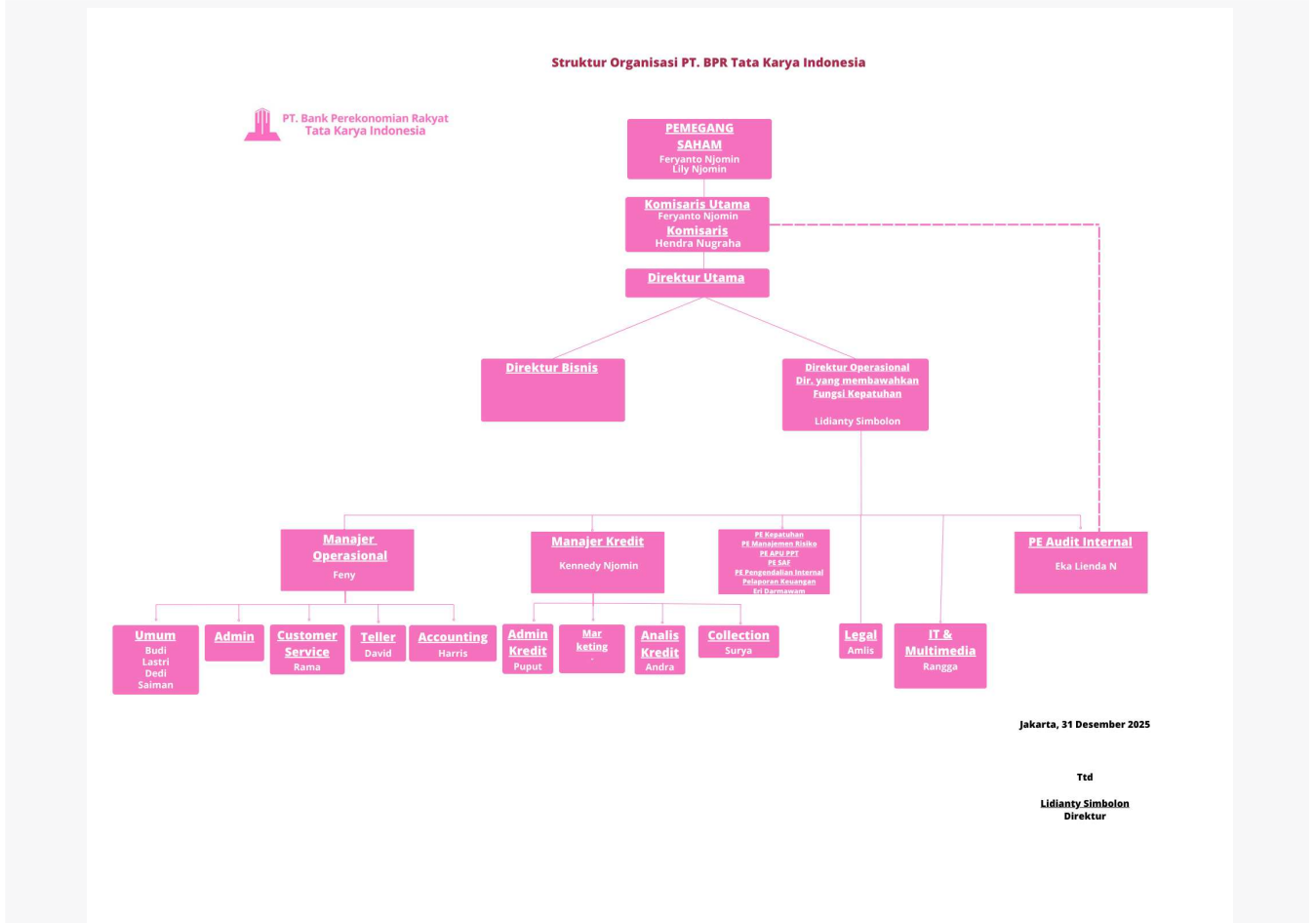
Monitoring dan Evaluasi yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal secara berkala.

- **Pengembangan Budaya Manajemen Risiko**

Edukasi dan Kesadaran yaitu Membangun budaya kesadaran risiko di seluruh organisasi dengan mengedukasi karyawan tentang pentingnya manajemen risiko dan peran mereka dalam proses tersebut.

3. Struktur Organisasi

Diagram / Gambar Struktur Organisasi



Penjelasan Struktur Organisasi

Jumlah Dewan Komisaris 2 Orang dan Direksi 1 orang yang berarti belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu berjumlah masing – masing 2 (dua) orang.

Namun dalam menjalankan tugasnya telah mencerminkan penerapan Tata kelola yang baik antara lain:

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalisasi tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.
3. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
4. Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.

4. Bidang Usaha

Bidang Usaha dan Produk BPR/BPRS		
1.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Happy Savings
	Uraian	Merupakan jenis tabungan reguler untuk masyarakat umum.
2.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Happy Savings Plus
	Uraian	Produk tabungan yang diberikan kepada karyawan PT BPR Tata Karya Indonesia
3.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Deposito
	Uraian	produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang di bank untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa.
4.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	KTA Kredit Tanpa Agunan
	Uraian	Kredit tanpa agunan yang diberikan kepada masyarakat umum dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPR Tata Karya Indonesia termasuk penyaluran kredit terhadap Pekerja Migran Indonesia.
5.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Karyawan
	Uraian	Kredit karyawan adalah fasilitas pinjaman yang ditawarkan kepada karyawan untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial, biasanya tanpa jaminan. Pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembelian kendaraan atau kebutuhan sehari-hari, dengan syarat dan ketentuan tertentu.
6.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar

	Nama Produk	Kredit Rekening Koran
	Uraian	Kredit rekening koran adalah suatu bentuk fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memiliki rekening koran. Pinjaman ini diberikan berdasarkan analisis terhadap riwayat transaksi dan saldo yang tercatat dalam rekening. Dengan demikian, bank akan menilai kelayakan kredit nasabah berdasarkan aktivitas keuangan yang tercermin dalam rekening koran.
7.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Multiguna
	Uraian	Kredit multiguna adalah jenis pinjaman dengan agunan yang diberikan dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, kredit multiguna memberikan fleksibilitas kepada peminjam untuk menggunakan dana yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan debitur, baik itu untuk keperluan konsumsi, investasi, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya.
8.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	KPR Kredit Pemilikan Rumah
	Uraian	Fasilitas kredit untuk membeli rumah dengan cara melakukan cicilan.
9.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Modal Kerja
	Uraian	Kredit modal kerja adalah fasilitas pinjaman yang diberikan, kepada perusahaan atau pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai kegiatan usaha yang bersifat jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya.

5. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi untuk Sistem Operasional

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting:

1. Sistem Operasional
 - a. Sistem operasional menggunakan Core Banking emBare
 - b. Sistem Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan meliputi :

- SiPeduli untuk pengaduan Nasabah, Self Assesment, edukasi dan Inklusi
 - SLIK untuk Sistem Informasi Layanan Keuangan
 - APOLO untuk pelaporan kepada OJK
 - Sigap untuk pelaporan APU PPT
- c. Sistem Aplikasi Sipesat Grips untuk PPAK
 - d. Web Portal dan Web Service DUKCAPIL
2. Sistem Keamanan
 - a. Untuk keamanan Data server ditempatkan diruangan khusus berpendingin udara yang hanya bisa diakses oleh karyawan yang ditunjuk.
 - b. Secara rutin dilakukan *Back up* data.

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Pengamanan Penyelenggaraan Teknologi Informasi di PT BPR Tata Karya Indonesia merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko TI yang dilakukan secara menyeluruh (*end-to-end*), yaitu:

Penetapan Kebijakan & Prosedur Keamanan Data

BPR Tata Karya Indonesia telah menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan TI sebagai pedoman pengelolaan dan perlindungan sistem serta data. Penerapan kebijakan dan prosedur keamanan data tersebut bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi, serta memitigasi risiko kebocoran data dan gangguan terhadap layanan TI, sejalan dengan prinsip manajemen risiko dan ketentuan regulator.

Pengendalian Akses

Penerapan hak akses berbasis kebutuhan (*user access management*) serta penggunaan autentikasi untuk membatasi akses tidak sah dan menerapkan limit kewenangan approval transaksi. Pengelolaan hak akses dilakukan secara terpusat dan terdokumentasi, meliputi proses permintaan, persetujuan, perubahan, hingga pencabutan akses, dengan melibatkan fungsi terkait sesuai prinsip *segregation of duties*.

Keamanan Jaringan

BPR Tata Karya Indonesia telah mengimplementasikan pengamanan infrastruktur dan jaringan melalui penggunaan *firewall*, *antivirus/endpoint protection*, serta sistem *monitoring jaringan* untuk mendeteksi dan mencegah ancaman siber serta akses tidak sah. *Firewall* dikonfigurasi untuk membatasi lalu lintas jaringan sesuai dengan kebijakan keamanan yang berlaku, termasuk pengaturan *port*, *protocol filtering*, dan segmentasi jaringan antara lingkungan internal dan eksternal. Sistem *antivirus* diterapkan pada seluruh perangkat dan diperbarui secara berkala guna melindungi dari *malware* dan ancaman sejenis.

Pemantauan & Audit

BPR Tata Karya Indonesia melaksanakan pemantauan secara berkala serta melaksanakan audit internal TI secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yang mencakup evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur, efektivitas pengendalian akses, keamanan sistem dan jaringan, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator. Hasil pemantauan dan audit didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direksi serta ditindaklanjuti secara tepat waktu, termasuk pelaksanaan rencana perbaikan (*corrective action plan*) untuk memastikan penguatan berkelanjutan atas pengendalian keamanan TI.

Peningkatan Kesadaran (*risk awareness*)

BPR Tata Karya Indonesia secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*) di seluruh tingkat organisasi melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait keamanan informasi dan risiko siber. Program peningkatan kesadaran dilakukan secara berkala dan terdokumentasi, serta disesuaikan dengan perkembangan risiko dan teknologi. Selain itu, BPR Tata Karya Indonesia juga mendorong kepatuhan pegawai terhadap kebijakan yang berlaku melalui komunikasi internal dan penguatan budaya sadar risiko. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan risiko yang bersumber dari faktor manusia (*human error*) serta memperkuat pertahanan lini pertama dalam menjaga keamanan informasi dan keberlangsungan operasional Bank.

6. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan dan Target Pasar

Guna mendukung rencana pengembangan usaha sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis, diperlukan adanya dukungan berupa target yang terukur serta kejelasan mengenai sasaran pasar. Tanpa adanya tolok ukur yang jelas dan segmentasi pasar yang tepat, upaya pengembangan usaha akan sulit untuk dievaluasi dan dicapai secara optimal.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam rangka pengembangan target pasar perlu dirumuskan secara sistematis, antara lain sebagai berikut:

Meningkatkan Jumlah Nasabah dari Wilayah Eksisting

BPR perlu secara aktif mendorong peningkatan basis nasabah di wilayah-wilayah yang selama ini telah menjadi pangsa pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih personal, peningkatan kualitas layanan, serta penawaran produk kredit dan simpanan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Memperluas Wilayah Pemasaran Baru di Sekitar Wilayah yang Sudah Ada

Ekspansi pemasaran dapat dilakukan dengan menjangkau wilayah-wilayah baru yang berada di sekitar wilayah operasional saat ini. Strategi ini memungkinkan BPR untuk memanfaatkan sinergi logistik, pemahaman budaya lokal, serta jaringan yang telah terbangun, sehingga biaya ekspansi dapat dikelola secara efisien dan risiko pasar dapat diminimalkan.

Menargetkan Pengembangan Usaha Berdasarkan Sektor Ekonomi Potensial

BPR perlu secara proaktif mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang dari sektor-sektor ekonomi unggulan yang terdapat di wilayah kerja. Sektor potensial tersebut dapat berupa perdagangan, UMKM, atau jasa yang menunjukkan pertumbuhan positif. Dengan fokus pada sektor-sektor ini, BPR dapat menyalurkan kredit secara lebih produktif dan mengurangi risiko kegagalan usaha debitur.

Melalui penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terukur, BPR diharapkan mampu mengembangkan target pasar secara bertahap, berkelanjutan, dan selaras dengan dinamika ekonomi daerah.

7. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Daftar Jaringan Kantor

1.	Nama Kantor	Kantor Pusat
	Alamat	Jembatan Tiga no 35 A-B
	Desa/Kecamatan	PENJARINGAN
	Kabupaten/Kota	Wil. Kota Jakarta Utara
	Kode Pos	14440
	Nama Pimpinan	LIDIANTY SIMBOLON

Nomor Telepon	021-6622017
Jumlah Kantor Kas	0

8. Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain

Kerja Sama BPR/BPRS dengan Bank atau Lembaga Lain

1.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Inovasi Finansial Untuk Indonesia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	21 Maret 2024
	Jenis Kerja Sama	Sebagai referal untuk pemberian pinjaman beragunan
	Uraian Kerja Sama	Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, di mana perusahaan berperan dalam memberikan referal kredit kepada BPR Tata Karya Indonesia. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
2.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Intan Ayu Lestari
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	01 Oktober 2024
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Taiwan, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
3.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Wahana Danau Indah
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	28 Juni 2024
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Jepang, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
4.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Nusa Putra Resources
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	03 November 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dan kepada Program Magang Internship ke luar negeri, di

		mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
5.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Alzubara Manpower Indonesia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	24 Oktober 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
6.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	KSP Agree Kapital
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	17 September 2025
	Jenis Kerja Sama	Sebagai referal untuk pemberian pinjaman beragunan
	Uraian Kerja Sama	Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, di mana perusahaan berperan dalam memberikan referal kredit kepada BPR Tata Karya Indonesia. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
7.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Amanah Putra Pratama
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	07 Agustus 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
8.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Lintas Cakrawala Buana
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	17 Juni 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
9.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Jaya Indo Medikaloka
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	03 Juli 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA

	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada karyawan perusahaan tersebut, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
10.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Diga Mitra Husada
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	27 Februari 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada karyawan perusahaan tersebut, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
11.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Gaya Hidup Serasi
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	27 Februari 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada karyawan perusahaan tersebut, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
12.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	UPT Puskesmas Jurumudi Baru
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	28 Mei 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit KTA
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada karyawan perusahaan tersebut, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.
13.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Koperasi jasa Postra
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	19 Mei 2025
	Jenis Kerja Sama	Penyaluran Kredit terhadap pensiunan BUMN, PNS, TNI, POLRI
	Uraian Kerja Sama	Kredit diberikan kepada pensiunan BUMN, PNS, TNI, POLRI dimana perusahaan tersebut, di mana perusahaan berperan sebagai pemberi referal dalam proses pengajuan kredit tersebut.

9. Penanganan Pengaduan Nasabah

Strategi pemasaran yang efektif, *engagement* kepada nasabah perlu terus dijaga dan ditingkatkan sebagai salah satu

upaya untuk meningkatkan kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) terhadap layanan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis.

BPR Tata Karya Indonesia terus berupaya menjaga konsistensi layanan yang fokus pada pelanggan melalui standarisasi kualitas layanan di *front liner* termasuk pada layanan penanganan keluhan pelanggan (*handling complaint*) yang siap memberikan pelayanan bisnis maupun *support* bisnis bagi unit kerja hingga penyelesaian keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan OJK yang diatur dalam POJK No. 22 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pengaduan nasabah akan diproses sebagaimana alur berikut:



Pada penyampaian hasil penyelesaian, nasabah dapat menyepakati ataupun tidak menyepakati hasil penyelesaian pengaduan sehingga di SOP Pelindungan Konsumen BPR Tata Karya Indonesia diatur bahwa:

1. Jika sepakat, maka pengaduan dianggap selesai.
2. Apabila tidak sepakat, nasabah dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui tahapan banding ke BPR Tata Karya Indonesia.
3. Apabila nasabah tetap tidak dapat menerima hasil penyelesaian pengaduan setelah tahap banding, nasabah dapat mengajukan permohonan penyelesaian pengaduan di pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian pengaduan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi maupun arbitrase kepada Regulator, Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), atau lembaga lainnya.

Dalam penanganan pengaduan nasabah, BPR Tata Karya Indonesia telah memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk memberikan solusi yang cepat, tepat, dan memuaskan bagi nasabah. Pada tahun 2025, tidak terdapat pengaduan nasabah.

Tabel Publikasi Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses	Tidak Selesai	Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Pesentase	Jumlah	Jumlah	
1	Produk/Jasa Bank Lainnya	0	0	0	0	0
2	Simpanan	0	0	0	0	0
3	Kredit Tanpa Angunan	2	0	0	0	2
4	Pinjaman (Modal Kerja, Investasi, Konsumer)	1	0	5	0	6
Grand Total		3	0	5	0	8

10. Tingkat Kesehatan Bank

BPR Tata Karya Indonesia secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Hasil akhir *self-assessment* TKB metode RGEC berupa Peringkat Komposit (PK), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Peringkat Tingkat Kesehatan PT BPR Tata Karya Indonesia dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR - *Risk Based Bank Rating*) berada pada Peringkat Komposit 2 (PK 2) – SEHAT.

VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Statistik Komposisi Karyawan Per Kantor

Jumlah Pegawai Pemasaran	1 orang
Jumlah Pegawai Pelayanan	2 orang

Jumlah Pegawai Lainnya	13 orang
Jumlah Pegawai Tetap	4 orang
Jumlah Pegawai Tidak Tetap	12 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S2	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S1/D4	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan D3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan SMA	10 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan Lainnya	13 orang
Jumlah Pegawai Laki-laki	12 orang
Jumlah Pegawai Perempuan	4 orang
Jumlah Pegawai Usia <=25	3 orang
Jumlah Pegawai Usia >25-35	7 orang
Jumlah Pegawai Usia >35-45	3 orang
Jumlah Pegawai Usia >45-55	3 orang
Jumlah Pegawai Usia >55	0 orang

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPR/BPRS

1.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Penerapan Tata Kelola
	Tanggal Pelaksanaan	15 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Menilai sendiri, menyusun dan menyampaikan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola BPR.
2.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	15 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Meningkatkan integritas pelaporan keuangan sesuai POJK 15 tahun 2024
3.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Pelaporan Tahunan
	Tanggal Pelaksanaan	09 April 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Penyusunan laporan tahunan.
4.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Pelaporan dan Pengaduan Nasabah
	Tanggal Pelaksanaan	10 September 2026
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Penyusunan laporan Pengaduan Nasabah
5.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis
	Tanggal Pelaksanaan	20 November 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif

	Uraian Kegiatan	Penyusunan Rencana Bisnis BPR
6.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
	Tanggal Pelaksanaan	21 November 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
7.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Laporan TKS BPR
	Tanggal Pelaksanaan	15 Desember 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Penyusunan Laporan TKS BPR
8.	Nama Kegiatan Pengembangan	Boosting Performance: The Impact of Training on Work Effectiveness and Morale
	Tanggal Pelaksanaan	22 November 2025
	Jumlah Peserta	16 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan semangat kerja dan motivasi karyawan.
9.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan APU PPT dan SAF
	Tanggal Pelaksanaan	20 Desember 2025
	Jumlah Peserta	16 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Penerapan APU PPT dan SAF untuk seluruh karyawan BPR TKI

VII. Laporan Keuangan Tahunan

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Dalam Satuan Rupiah Penuh

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Kas dalam Rupiah	369.139.700	195.852.500
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	19.905.845.326	14.976.705.089
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Lain	33.750.000	15.876.560
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	53.961.198.036	64.620.302.407
Provisi yang belum diamortisasi	297.107.471	322.776.346
Biaya Transaksi Belum diamortisasi	0	0
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	244.697.535	742.323.015
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	399.819.042	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	2.509.561.753	2.689.971.903
Penyertaan Modal	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan Modal	0	0
Agunan yang diambil alih	11.384.269.200	4.440.578.769
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	1.003.350.338	588.704.675
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	583.640.724	372.164.739
Aset Tidak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	0	0
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Lainnya	0	0
Aset Lainnya	1.007.034.792	1.340.679.939

TOTAL ASET	83.562.260.867	82.019.710.816
Liabilitas Segera	732.815.860	159.225.976
Tabungan	10.499.616.436	11.008.953.403
Biaya Transaksi Tabungan Belum Diamortisasi	0	0
Deposito	39.176.905.827	38.383.638.660
Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	1.500.000.000	1.750.000.000
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	3.697.351.754	4.605.025.102
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	35.425.000	49.595.000
Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	2.245.970.772	2.327.845.934
TOTAL LIABILITAS	57.817.235.649	58.185.094.075
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000
Modal yang Belum Disetor -/-	6.000.000.000	6.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	0	0
Agio	0	0
Modal Sumbangan	0	0
Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
Ekuitas Lainnya	0	0
Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan	0	0
Umum	5.648.993.256	5.648.993.256
Tujuan	0	0
Laba (Rugi)	0	0
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	3.267.379.920	3.037.819.027
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.828.652.042	1.147.804.458
TOTAL EKUITAS	25.745.025.218	23.834.616.741

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

Dalam Satuan Rupiah Penuh

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Pendapatan Operasional	13.057.196.224	12.168.279.523
1. Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
Surat Berharga	0	0
Giro	23.281.936	33.880.271
Tabungan	34.995.570	32.604.484
Deposito	883.984.449	894.834.693
Sertifikat Deposito	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	10.056.951.116	8.240.019.995
b. Provisi Kredit		
Kredit Kepada Bank Lain	0	0
Kredit Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	286.233.932	311.479.099
c. Biaya Transaksi -/-		
Surat Berharga	0	0
KYD Kepada Bank Lain	55.821.131	93.446.907
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	582.451.407	39.951.627
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	2	
2. Pendapatan Lainnya		
a. Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	10.000.000	0
e. Pemulihan CKPN	1.451.028.164	1.563.129.467
f. Dividen	0	0
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h. Keuntungan penjualan AYDA	219.708.025	670.446.508
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0
k. Lainnya	729.285.572	555.283.540

Beban Operasional	9.545.945.662	10.930.929.884
1. Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
Tabungan	305.976.429	440.299.156
Deposito	2.521.528.656	2.386.403.500
Simpanan dari Bank Lain	95.505.347	189.203.129
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Indonesia	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Lain	443.937.382	539.911.439
Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	1.245.399	0
Pinjaman yang Diterima Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
Beban Bunga Lainnya	103.878.957	109.091.640
b. Biaya Transaksi		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	399.819.042	0
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	103.907.390	94.308.357
c. KYD Kepada Bank Lain	0	0
d. KYD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	1.194.434.501	3.847.184.418
e. Penyertaan Modal	0	0
f. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4. Beban Pemasaran	0	0
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Upah	1.583.517.212	1.429.003.859
Honorarium	237.600.000	226.800.000
Lainnya	2.572.842	273.750
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	0	46.341.951
c. Beban Sewa		
Gedung Kantor	440.000.000	440.000.000
Lainnya	0	0

d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	97.502.256	79.884.116
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	4.375.001
f. Beban Premi Asuransi	20.034.933	21.070.248
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	248.208.189	63.754.484
h. Beban Barang dan Jasa	596.296.347	702.231.518
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	72.193.877	67.346.934
j. Kerugian terkait risiko operasional		
Kecurangan internal	0	0
Kejahatan eksternal	0	0
k. Pajak-pajak	47.222.214	38.067.546
7. Beban lainnya		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d. Kerugian penjualan AYDA	0	56.439.018
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f. Lainnya	1.030.564.689	148.939.820
Laba (Rugi) Operasional	3.511.250.562	1.237.349.639
Pendapatan Non Operasional	194.826.287	706.795.522
1. Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	80.000.000	656.248.080
2. Pemulihan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Pemulihan Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	114.826.287	50.547.442
Beban Non Operasional	260.956.652	616.477.773
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Kerugian Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	260.956.652	616.477.773
Laba (Rugi) Non Operasional	-66.130.365	90.317.749

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3.445.120.197	1.327.667.388
Taksiran Pajak Penghasilan	616.468.155	179.862.930
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.828.652.042	1.147.804.458
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan Rekening Administratif

Dalam Satuan Rupiah Penuh

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Tagihan Komitmen		
Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	1.596.160.492	1.708.343.335
Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	2.297.240.965	3.881.400.560
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0

b. Aset Produktif yang dihapusbuku

1) Kredit yang Diberikan	3.489.714.965	3.479.864.526
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	2.323.282.651	2.322.203.209
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	107.717.296	394.219.612

4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas
Dalam Satuan Rupiah Penuh

Keterangan	Modal Disetor	Tambahan Modal	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Des Tahun 2023	20.000.000.000	-6.000.000.000	5.648.993.256	3.037.819.028	22.686.812.284
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset 2025 tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	1.147.804.454	1.147.804.454
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun 2024	20.000.000.000	-6.000.000.000	5.648.993.256	4.185.623.482	23.834.616.738
Dividen	0	0	0	-1.033.024.009	-1.033.024.009
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset 2025 tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	2.828.652.041	2.828.652.041
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo Akhir (per 31 Des)	20.000.000.000	-6.000.000.000	5.648.993.256	5.981.251.514	25.630.244.770

5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas
Dalam Satuan Rupiah Penuh

Keterangan	Saldo 2025	Saldo 2024
Penerimaan pendapatan bunga	10.360.940.533	9.067.940.909
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	260.565.056	200.983.479
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	1.912.396.281	1.385.017.182
Pembayaran beban bunga	-3.472.072.171	-3.664.908.864
Beban gaji dan tunjangan	-1.823.690.054	-1.702.419.562
Beban umum dan administrasi	-1.372.095.561	-1.584.625.987
Beban operasional lainnya	-2.429.329.567	-3.295.325.841
Pendapatan non operasional lainnya	194.826.288	706.795.522
Beban non operasional lainnya	-260.956.652	-616.477.773
Pembayaran pajak penghasilan	-616.468.155	0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penempatan pada bank lain	-6.325.601.212	19.991.593.255
Kredit yang diberikan	10.659.104.371	-1.804.295.344
Agunan yang diambil alih	-6.943.690.431	-4.440.578.769
Aset lain-lain	333.645.147	4.654.070.701
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Liabilitas segera	-42.147.965	-84.868.753
Tabungan	0	-1.066.874.251
Deposito	283.930.201	-6.393.125.091
Simpanan dari bank lain	-250.000.000	-3.460.000.000
Pinjaman yang diterima	209.089.783	0
Liabilitas imbalan kerja	0	-253.727.615
Liabilitas lain-lain	533.862.686	-92.782.582
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	1.212.308.578	7.546.390.616
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	-414.645.663	1.300.153.040
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	-414.645.663	1.300.153.040

Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	-918.243.562	0
Penyesuaian lainnya	-1.102.593.131	-991.738.555
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	-2.020.836.693	-991.738.555
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	-1.223.173.778	7.854.805.101
Kas dan setara Kas awal periode	7.897.245.401	42.440.300
Kas dan setara Kas akhir periode	6.674.071.623	7.897.245.401

VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik

Ringkasan Opini Akuntan Publik

Dalam rangka pengukuran awal aset tetap [yang wajar saji], mulai tahun buku 2026, perusahaan agar memperhatikan ketentuan terkait; SAK - EP - Bab 17.

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Posisi Tanggal 31 Desember 2025
PT BPR Tata Karya Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Lidianty Simbolon
Alamat Kantor : Jl. Jembatan Tiga No.35 A-B, Jakarta Utara
Alamat Domisili : Pondok Serut, RT/005 RW/003, Kel. Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
Nomor Telepon : 021 6622017
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Laporan Keuangan PT BPR Tata Karya Indonesia telah disusun untuk laporan keuangan posisi tanggal 31 Desember 2025 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku,
2. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Tata Karya Indonesia posisi tanggal 31 Desember 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar,
3. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR Tata Karya Indonesia posisi tanggal 31 Desember 2025 sesuai POJK mengenai integritas pelaporan keuangan Bank,
4. Hasil Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan dokumen Penilaian Sendiri Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2026
PT BPR Tata Karya Indonesia



Lidianty Simbolon
Direktur

Lembar Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2025
PT BPR Tata Karya Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT BPR Tata Karya Indonesia tahun 2025 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2026

PT BPR Tata Karya Indonesia



Lidianty Simbolon
Direktur



Feryanto Njomin
Komisaris Utama



Hendra Nugraha
Komisaris

Management Letter

Laporan No. 00004/KAP.YHW_ManLett07.2/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR.) TATA KARYA INDONESIA

Kami telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR.) TATA KARYA INDONESIA ("Perusahaan"), untuk tahun yang berakhir 31 DESEMBER 2025.

Sebagai bagian dari pemeriksaan tersebut, kami melakukan studi dan evaluasi terhadap struktur pengendalian intern Perusahaan, seperti yang diharuskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup pemeriksaan.

Evaluasi terhadap struktur pengendalian intern ini bukan merupakan suatu pemeriksaan khusus terhadap struktur pengendalian intern Perusahaan, dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan pemeriksaan kami.

Keadaan administrasi serta struktur pengendalian intern Perusahaan secara umum baik, tetapi selama pemeriksaan berlangsung kami menemukan beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian Dewan Direksi untuk diperbaiki.

Berikut kami sampaikan beberapa kelemahan dalam pengendalian intern Perusahaan beserta sarannya.

1 Aset Tetap

1.1. Temuan

- Salah saji pengukuran pada saat pengakuan awal

List berikut merincikan kesalahan perusahaan, dalam melakukan pengukuran aset tetap inventaris pada saat pengakuan awal.

Jenis inventaris	harga faktur	ppn 11%	cost attributed	test	book	audited
Sharp LED TV	11.946.892	1.314.158	-	-	13.261.050	11.946.892

1.2. Basis acuan ; SAK - EP, Bab 17; Aset tetap

Par. 17.10. Biaya perolehan aset tetap dan inventaris terdiri dari seluruh hal berikut:

- (a) harga beli, termasuk fee legal dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, setelah dikurangi diskon dagang dan rabat;
- (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat dioperasikan sesuai dengan intensi manajemen. Hal ini mencakup biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penyerahan dan penanganan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsional;

Management Letter (lanjutan)

Laporan No. 00004/KAP.YHW_ManLett07.2/III/2026

1 Aset Tetap

1.2. Basis acuan ; SAK - EP, Bab 17; Aset tetap (lanjutan)

(c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain memproduksi persediaan selama periode tersebut.

1.3. Saran dan rekomendasi

-- Dalam rangka pengukuran awal aset tetap (yang wajar saji), mulai tahun buku 2026, perusahaan agar memperhatikan ketentuan terkait; SAK - EP - Bab 17.

Management letter ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi kepada Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT. BPR. TATA KARYA INDONESIA, dan tidak disajikan untuk pihak-pihak di luar Perusahaan untuk mencegah timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang tidak memahami tujuan dan keterbatasan pengendalian intern, evaluasi serta test yang kami lakukan atas pengendalian intern tersebut. Terimakasih untuk kerjasamanya.



Kantor Akuntan Publik
Yohan H. Wibowo
Kepmenkeu No. 85/ KM.1/ 2018

Yohan H. Wibowo, SE., Ak., MM., CA., CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP - 1525

Tangerang Selatan, 04 Maret 2026